



Pemerintah Kabupaten Bone

# Rencana Kerja (Renja) 2022



Kecamatan ajangale

Kabupaten Bone



**BUPATI BONE**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE**  
**NOMOR 46 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**KABUPATEN BONE TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 yang terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta memberi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022, maka diperlukan Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 5);
  17. Peraturan Bupati Bone Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone tahun 2020 Nomor 60);
  18. Peraturan Bupati Bone Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 34).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan wilayah pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
6. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilhan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### **Pasal 2**

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan selama 1 (satu) tahun, dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, dan Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

### **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 3**

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disusun dengan maksud:

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022; dan
- c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022.

### **BAB III SISTEMATIKA PENULISAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan;  
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;  
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;  
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;  
Bab V : Penutup.

- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:

Lampiran I : Dinas Pendidikan  
Lampiran II : Dinas Kesehatan

Lampiran III	: BLUD RSUD Tenriawaru
Lampiran IV	: Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Lampiran V	: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
Lampiran VI	: Satuan Polisi Pamong Praja
Lampiran VII	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Lampiran VIII	: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Lampiran IX	: Dinas Sosial
Lampiran X	: Dinas Ketenagakerjaan
Lampiran XI	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Lampiran XII	: Dinas Ketahanan Pangan
Lampiran XIII	: Dinas Lingkungan Hidup
Lampiran XIV	: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Lampiran XV	: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Lampiran XVI	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Lampiran XVII	: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Lampiran XVIII	: Dinas Perhubungan
Lampiran XIX	: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Lampiran XX	: Dinas Koperasi
Lampiran XXI	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu
Lampiran XXII	: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Lampiran XXIII	: Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik
Lampiran XXIV	: Dinas Kebudayaan
Lampiran XXV	: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Lampiran XXVI	: Dinas Pariwisata
Lampiran XXVII	: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Lampiran XXVIII	: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Lampiran XXIX	: Dinas Perindustrian
Lampiran XXX	: Dinas Perdagangan
Lampiran XXXI	: Dinas Perikanan
Lampiran XXXII	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampiran XXXIII	: Badan Keuangan dan Aset Daerah
Lampiran XXXIV	: Badan Pendapatan Daerah
Lampiran XXXV	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Lampiran XXXVI	: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Lampiran XXXVII	: Inspektorat Daerah
Lampiran XXXVIII	: Sekretariat DPRD
Lampiran XXXIX	: Sekretariat Daerah

**Pasal 7**






Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV  
PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. DR. H. MUHAMMAD ALI, M.Si	
2. H. ANDI ISLAMUDDIN, S.Sos, M.M	
3. ANWAR, SH., M.Si, M.H.	
4. A. ERNI, SH., M.Si	
5. RAMLI, SH	

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 29 Juli 2021

**BUPATI BONE,**

  
**A. FAHSAR M. PADJALANGI**

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 29 Juli 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,**

  
**H. ANDI ISLAMUDDIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021 NOMOR 48

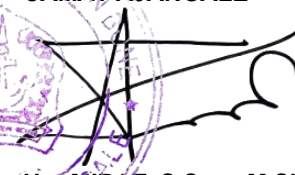


## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah kami panjatkan Kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat taufik serta hidayahNya sehingga kami dapat menyusun Renja tahun 2022. Renja ini merupakan wujud dari model penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang tertuang dalam Renja Kecamatan Ajangale tahun 2022.

Renja tahun 2022 memaparkan evaluasi kinerja Kecamatan Ajangale tahun 2020 dan 2021 serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan ditahun 2022 sehingga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi aparatur dalam menentukan prioritas-prioritas pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Di sisi lain Renja ini juga berisikan indikator-indikator kinerja sehingga dapat dijadikan evaluasi atau tolak ukur kinerja yang bermanfaat untuk mengetahui capaian kinerja Kecamatan Ajangale dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bone.

Demikian Renja ini kami susun sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang baik di Kecamatan Ajangale di Tahun 2022.

Pompanua, 23 Juli 2021  
**CAMAT AJANGALE**  
  
**H. AMIRAT, S.Sos., M.Si**  
Pangkat : Pembina  
Nip. 19681015 198912 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan ... ..	6
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN TAHUN LALU.....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Ajangale Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Ajangale.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	26
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	26
2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat .....	37
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	38
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	38
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	39
3.3 Program dan Kegiatan .....	39
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	42
BAB V PENUTUP .....	47

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan Ajangale, dan pelaksanaa tugas pelayanan publik sebagai tindaklanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan yang dicapai pada masa satu tahun.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 Kecamatan Ajangale dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1, Pemberian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Kecamatan, maka perencanaan tujuan Kecamatan mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 Kecamatan Ajangale memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ajangale serta kerangka pendanaan daerah, Renja Kecamatan Ajangale secara substansial sesuai dengan Visi, Misi, agenda Kecamatan dan rencana resmi daerah (RKPD, RPJMD dan Renstra Kecamatan) dengan Renja K / L dan Renja Provinsi/Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses

Penyusunan RAPBD, sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program – program yang ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan.
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah .
3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan ( Stake holder ) terhadap pembangunan.
4. Pendekatan Top – Down ( Atas – Bawah ) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program – program jenjang pemerintah di atasnya.
5. Pendekatan Botom – Up ( Bawah – Atas ) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stake holder atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan, Top - Down dan Botom – Up diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.

Rencana Kerja ( RENJA ) Kecamatan Ajangale Tahun 2022 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan, mengacu kepada Rancangan RKPD Kabupaten Bone Tahun 2022, Renstra Kecamatan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan priode sebelumnya.

## **1.2. Landasan Hukum**

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945
3. Landasan Operasional :
  1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan standar pelayanan minimal keuangan daerah;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah;

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara penyusunan rencana pembangunan Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah kepada DPRD dan Informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah Nasional;
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah Nasional Tahun 2010-2014;
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang jasa pemerintah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 Tahun 2011;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem perencanaan pembangunan daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 08 Tahun 2008 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Bone (Lembaran daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 8);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintahan Kabupaten Bone;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 29 Tahun 2006 tentang Perubahan atas peraturan daerah nomor 7 tahun 2008 tentang Rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Bone tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
32. Peraturan Bupati Bone Nomor 42 Tahun 2012 tentang Petunjuk pelaksanaan Musrenbang yang terintegrasi.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ajangale Tahun 2022 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bagi Kecamatan Ajangale pada Tahun 2022.

Rancangan Akhir Renja Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone Tahun 2022 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi Kecamatan Ajangale dalam menentukan Prioritas program dan kegiatan tahun 2022.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Ajangale dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Ajangale untuk memenuhi arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahun 2022.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

### Bab I Pendahuluan

#### 1.1 Latar Belakang

Berisi uraian Latar Belakang yang dikemukakan secara ringkas tentang Rencana Kerja Kecamatan, proses penyusunan Rencana Kerja Kecamatan, keterkaitan antara Rencana Kerja Kecamatan dengan dokumen RKPD, Renstra Kecamatan, dengan Rencana Kerja K/L dan Rencana Kerja Provinsi, serta tindak lanjutnya

#### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Kecamatan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Kecamatan.

#### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Kecamatan serta susunan garis besar isi dokumen

### Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Tahun Lalu

pada bab ini memuat kajian ( Review ) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan tahun lalu ( tahun n-2 ) dan perkiraan capaian tahun berjalan ( tahun n-1 ).

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Ajangale tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan

#### 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan

#### 2.3 Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan

#### 2.4 Reviuw terhadap Rancangan Awal RKPD

#### 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat

### Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

#### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional,



Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaah yang menyangkut arahan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan. Diskripsi untuk mengisi sub – sub ini mengacu pada kertas kerja bagian telaahan terhadap kebijakan nasional.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan,

Bagian ini berisikan mengenai penjelasan :

- a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program / kegiatan, Pagu indikator, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan.

### 3.3 Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan Program dan Kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan

Bab V Penutup

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Ajangale Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Ajangale**

Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Kecamatan Ajangale merupakan dokumen Perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis Kecamatan Ajangale. Tercapai atau tidaknya atas pelaksanaan kegiatan program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Kecamatan Ajangale menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Ajangale selama tahun 2020 dan tahun berjalan 2021 serta perkiraan target 2022 .

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Kecamatan Ajangale 2020 telah terlewati. Berbagai Program dan Kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2020 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh, yang kesemuanya itu tertuang dalam Tabel T-C.29 berikut :

**Tabel T-C.29.**

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 Berdasarkan Permendagri 90 Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN AJANGALE

PERMENDAGRI 90

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8-(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7														
7	01													
		<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>												
		<b>KECAMATAN</b>												

7	01	01				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Cakupan Realisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)</b>									
7	01	01	2	01		<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Realisasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>									
7	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun (Dokumen)	7	1	1	1	100%	6	8	15%	
7	01	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang Tersusun (Dokumen)	6	1	1	1	100%	1	3	50%	
7	01	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Tersusun (Dokumen)	6	1	1	1	100%	1	3	50%	
7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja Yang Tersusun dan dilaporkan sesuai kewajiban perangkat daerah (Dokumen)	6	1	1	1	100%	1	3	50%	

7	01	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (Dokumen)	6	1	1	1	100%	1	3	50%
7	01	01	2	02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>								
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	12	12	12	100%	12	36	30%
7	01	01	2	05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>								
7	01	01	2	05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Pasang)	30	0	0	0	0%	30	30	50%
7	01	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Pasang)	20	0	0	0	0%	20	20	50%
7	01	01	2	06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana</b>								

7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan (Paket)	60	60	60	60	100%	60	180	30%
7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Logistik Kantor (Paket)	12	12	12	12	100%	12	36	30%
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Paket)	12	12	12	12	100%	12	36	30%
7	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pembayaran Media yang menyediakan Bahan Bacaan (Kali)	12	12	12	12	100%	12	36	30%
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rutin Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tupoksi Organisasi yang di ikuti (Kegiatan)	264	198	198	198	100%	218	614	33%

7	01	01	2	07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>										
7	01	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)	1	0	0	0	0%	1	1	10%		
7	01	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel (Paket)	3	0	0	0	0%	0	0	0		
7	01	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Paket)	4	0	0	0	0%	4	0	25%		
7	01	01	2	08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik, Wifi dan Air yang Terbayarkan (Rekening)	36	24	24	24	100%	36	84	34%		

7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi yang Mendapatkan Jasa Pelayanan Umum Kantor Selama Setahun (Kali)	108	108	108	108	100%	108	324	30%
7	01	01	2	09		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>								
7	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Unit)	48	48	48	48	100%	48	144	30%
7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya (Paket)	12	12	12	12	100%	12	26	17%
7	01	02				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)</b>								



7	01	02	2	01		<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>										
7	01	02	2	01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Kegiatan)	1	1	1	1	100%	1	3	30%		
7	01	03				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)</b>										
7	01	03	2	01		<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>										
7	01	03	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS dan TKSK (Dokumen)	2	2	2	2	100%	2	6	30%		
7	01	03	2	02		<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	<i>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Terlaksana</i>										

7	01	03	2	02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan (Kegiatan)	2	2	2	2	100%	2	6	30%
7	01	03	2	02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kegiatan)	2	2	2	2	100%	2	6	30%
7	01	04				<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)</b>								
7	01	04	2	01		<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>								
7	01	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kali)	12	12	12	12	100%	12	26	17%
7	01	06				<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)</b>								

7	01	06	2	01		<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>									
7	01	06	2	01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0	12	12	12	100%	12	26	26%	
7	01	06	2	01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (Laporan)	12	12	12	12	100%	12	26	17%	

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan**

Pengukuran Kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dilakukan melalui Penetapan indikator kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan, indikator kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (ouput), hasil (outcome), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan dan indikator lainnya. Penetapan indikator ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama, pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan kinerja.

Kecamatan Ajangale sebagai salah satu, perangkat daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi pemerintah kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat ditingkat kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berikut pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Kecamatan Ajangale yang dijabarkan ke dalam Tabel T-C.30 berikut

**Tabel T-C.30.**

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kantor Camat Ajangale  
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

PERMENDAGRI 90

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	<b>Jumlah Realisasi Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>											
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun (Dokumen)			7	6	7	6	7	6	7	6	
2	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang Tersusun (Dokumen)			1	1	1	1	1	1	1	1	
3	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Tersusun (Dokumen)			1	1	1	1	1	1	1	1	

4	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja Yang Tersusun dan dilaporkan sesuai kewajiban perangkat daerah (Dokumen)			1	1	1	1	1	1	1	1	
5	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (Dokumen)			1	1	1	1	1	1	1	1	
<b><i>Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i></b>												
6	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			12	12	12	12	12	12	12	12	
<b><i>Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i></b>												
7	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Pasang)			0	0	20	20	0	0	20	20	

8	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Pasang)			0	0	30	30	0	0	30	30	
<b><i>Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana</i></b>												
9	Jumlah Paket Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan (Paket)			60	60	60	60	60	60	60	60	
10	Jumlah Paket Penyediaan Logistik Kantor (Paket)			12	12	12	12	12	12	12	12	
11	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Paket)			12	12	12	12	12	12	12	12	
12	Jumlah Pembayaran Media yang menyediakan Bahan Bacaan (Kali)			12	12	12	12	12	12	12	12	

13	Jumlah Kegiatan Rutin Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tupoksi Organisasi yang di ikuti (Kegiatan)			180	198	218	240	180	198	218	240	
	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>											
14	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)			0	0	1	0	0	0	1	0	
15	Jumlah Pengadaan Mebel (Paket)			0	0	3	3	0	0	3	3	
16	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Paket)			0	0	4	4	0	0	4	4	
	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											



17	Jumlah Rekening Listrik, Wifi dan Air yang Terbayarkan (Rekening)			24	36	36	36	24	36	36	36	
18	Jumlah Tenaga Administrasi yang Mendapatkan Jasa Pelayanan Umum Kantor Selama Setahun (Kali)			108	108	108	108	108	108	108	108	
<b><i>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>												
19	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Unit)			48	48	48	48	48	48	48	48	
20	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya (Paket)			12	12	12	12	12	12	12	12	
<b><i>Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i></b>												

21	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Kegiatan)			1	1	1	1	1	1	1	1	
	<b><i>Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i></b>											
22	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS dan TKSK (Dokumen)			2	2	2	2	2	2	2	2	
	<b><i>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Terlaksana</i></b>											
23	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan (Kegiatan)			2	2	2	2	2	2	2	2	
24	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kegiatan)			2	2	2	2	2	2	2	2	
	<b><i>Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i></b>											

25	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kali)			12	12	12	12	12	12	12	12	
	<b><i>Jumlah Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i></b>											
26	Jumlah Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			0	12	12	12	12	12	12	12	
27	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (Laporan)			12	12	12	12	12	12	12	12	

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Secara umum isu-isu penting strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Ajangale adalah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Camat kepada para Pemangku Jabatan Fungsional di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di kantor Camat Ajangale.
2. Pelayanan Prima Kecamatan Ajangale sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Bone yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku.
3. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat.
4. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan Ajangale harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pemabangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat

### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ajangale serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Bone. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Ajangale diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka

mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

- a. Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan. Dalam RKPD 2019 Kecamatan Ajangale mengusulkan 5 Program dengan 12 kegiatan dan 27 Sub Kegiatan.
- b. Penjelasan mengenai temuan dan catatan penting. Program dan kegiatan pada Kecamatan Ajangale mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bone. Adapun review terhadap rancangan awal RKPD terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD tertuang dalam tabel T-C.31 berikut ini :

**Tabel T-C.31.**

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022  
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

Nama Perangkat Daerah : Kantor Camat Ajangale

PERMENDAGRI 90

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>										
	<b>KECAMATAN</b>										
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Cakupan Realisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Cakupan Realisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)</b>			
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<i>Jumlah Realisasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<i>Jumlah Realisasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Ajangale	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun (Dokumen)	6	24.889.700	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Ajangale	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun (Dokumen)	6	27.378.670	

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Ajangale	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang Tersusun (Dokumen)	1	4.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Ajangale	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang Tersusun (Dokumen)	1	4.840.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Ajangale	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Tersusun (Dokumen)	1	4.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Ajangale	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Tersusun (Dokumen)	1	4.840.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Ajangale	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja Yang Tersusun dan dilaporkan sesuai kewajiban perangkat daerah (Dokumen)	6	3.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Ajangale	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja Yang Tersusun dan dilaporkan sesuai kewajiban perangkat daerah (Dokumen)	6	3.850.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Ajangale	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (Dokumen)	1	4.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Ajangale	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (Dokumen)	1	4.400.000	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Ajangale	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	8.995.153.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Ajangale	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	9.894.668.300	

<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kecamatan Ajangale	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Pasang)	30	7.500.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kecamatan Ajangale	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Pasang)	30	8.250.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Ajangale	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Pasang)	20	5.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Ajangale	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Pasang)	20	5.500.000	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana</b>			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana</b>			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Ajangale	Jumlah Paket Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan (Paket)	60	33.550.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Ajangale	Jumlah Paket Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan (Paket)	60	36.905.000	



	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Ajangale	Jumlah Paket Penyediaan Logistik Kantor (Paket)	12	48.453.900	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Ajangale	Jumlah Paket Penyediaan Logistik Kantor (Paket)	12	53.299.290	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Ajangale	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Paket)	12	11.572.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Ajangale	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Paket)	12	12.729.200	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Ajangale	Jumlah Pembayaran Media yang menyediakan Bahan Bacaan (Kali)	12	3.960.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Ajangale	Jumlah Pembayaran Media yang menyediakan Bahan Bacaan (Kali)	12	4.356.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Ajangale	Jumlah Kegiatan Rutin Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tupoksi Organisasi yang di ikuti (Kegiatan)	240	139.668.485	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Ajangale	Jumlah Kegiatan Rutin Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tupoksi Organisasi yang di ikuti (Kegiatan)	240	153.635.334	

	<b><i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i></b>		<b><i>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i></b>			<b><i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i></b>		<b><i>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i></b>			
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Ajangale	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)	1	25.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Ajangale	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)	1	30.000.000	
	Pengadaan Mebel	Kecamatan Ajangale	Jumlah Pengadaan Mebel (Paket)	3	28.600.000	Pengadaan Mebel	Kecamatan Ajangale	Jumlah Pengadaan Mebel (Paket)	3	31.460.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Ajangale	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Paket)	4	14.597.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Ajangale	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Paket)	4	16.056.700	
	<b><i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>		<b><i>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>			<b><i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>		<b><i>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>			

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Ajangale	Jumlah Rekening Listrik, Wifi dan Air yang Terbayarkan (Rekening)	36	34.611.990	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Ajangale	Jumlah Rekening Listrik, Wifi dan Air yang Terbayarkan (Rekening)	36	38.073.188	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Ajangale	Jumlah Tenaga Administrasi yang Mendapatkan Jasa Pelayanan Umum Kantor Selama Setahun (Kali)	996	64.015.776	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Ajangale	Jumlah Tenaga Administrasi yang Mendapatkan Jasa Pelayanan Umum Kantor Selama Setahun (Kali)	996	70.417.354	
	<b><i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>		<b><i>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>			<b><i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>		<b><i>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Ajangale	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Unit)	48	93.622.540	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Ajangale	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Unit)	48	102.984.794	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Ajangale	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya (Paket)	12	20.846.788	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Ajangale	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya (Paket)	12	22.931.466	
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)</b>			
	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>		<i>Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>			<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>		<i>Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>			
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Ajangale	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Kegiatan)	1	30.545.900	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Ajangale	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Kegiatan)	1	33.600.490	
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		<b>Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		<b>Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)</b>			

	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>		<i>Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>			<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>		<i>Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>			
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Ajangale	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS dan TKSK (Dokumen)	2	58.031.600	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Ajangale	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS dan TKSK (Dokumen)	2	63.834.760	
	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>		<i>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Terlaksana</i>			<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>		<i>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Terlaksana</i>			
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Ajangale	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan (Kegiatan)	2	539.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Ajangale	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan (Kegiatan)	2	592.900.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Ajangale	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kegiatan)	2	6.600.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Ajangale	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kegiatan)	2	7.260.000	
4	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		<b>Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)</b>			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		<b>Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)</b>			

	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>		<i>Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>			<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>		<i>Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>			
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Ajangale	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kali)	12	29.700.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Ajangale	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kali)	12	32.670.000	
5	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)</b>			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)</b>			
	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>		<i>Jumlah Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>			<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>		<i>Jumlah Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>			
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Ajangale	Jumlah Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12	4.356.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Ajangale	Jumlah Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12	4.791.600	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Ajangale	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (Laporan)	12	6.655.000	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Ajangale	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (Laporan)	12	7.320.500	

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat**

1. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas di dalam Musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun / Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke forum Musrenbangdes.
2. Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan.
3. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan real masyarakat serta isu - isu penting dari masing – masing SKPD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan.

Pemerintah Kecamatan Ajangale dalam pelaksanaan pembangunan menggunakan suatu model yang disebut Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP) yang bermakna bahwa ide pembangunan tidak dari pemerintah kepada masyarakat (Top Down) tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat untuk memberikan usulan – usulan pembangunan kepada Pemerintah (Bottom Up) dalam wadah kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan hingga tingkat kabupaten.

### BAB III

#### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

##### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Sebagai suatu keharusan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan, maka dari itu perlu diukur kinerja dari setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kota, Provinsi maupun Kebijakan Nasional.

Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2022 tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bone sesuai tema Tahun 2022 adalah *“Akselerasi Ekonomi Serta Penguatan Kapasitas Sosial Dan Kesehatan Masyarakat”*.

Adapun Prioritas Nasional, Propinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bone terkait dengan prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 disajikan dalam table berikut ini :

No	Nasional	Sulawesi Selatan	Kabupaten Bone
1	Rancangan Teknokratik RPJMD 2020-2024	Perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan public	Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan public yang berkualitas
2		Penguatan infrastruktur wilayah	Pengembangan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat
3		Pengembangan Kawasan pusat pertumbuhan	Peningkatan pelayanan Pendidikan, kesehatan, dan sosial dasar lainnya
4		Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	Percepatan pembangunan daerah yang bertumpu pada desa dan Kawasan perdesaa
5		Pembangunan Manusia	Pengembangan inovasi daerah untuk mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik
6		Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	Penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pengembangan usaha
7		Pelestarian lingkungan hidup	Stabilitas keamanan, ketertiban, ketentraman dalam kemajemukan masyarakat

Tabel diatas menunjukkan adanya sinkronisasi kebijakan nasional dan provinsi dengan arah kebijakan dan program Kabupaten Bone.



### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan dan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD kecamatan ajangale yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra Kecamatan Ajangale 2020-2023.

Dengan menitik beratkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan Rencana Strategis maka kecamatan ajangale mempunyai *tujuan*:

1. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dibidang pelayanan
2. Meningkatkan sarana dan prasarana yang berbaris ilmu teknologi
3. Meningkatkan tertib administrasi utama bidang pelayanan

Dengan *sasaran* sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dibidang pelayanan
2. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang berbasis teknologi
3. Meningkatkan ketepatan dan kecepatan dalam memberikan pelayanan kepada warga masyarakat
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam kehidupan masyarakat.

### 3.3 Program dan Kegiatan

- a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Kecamatan Ajangale 2022

Dalam merumuskan program kegiatan, Kecamatan Ajangale mempertimbangkan beberapa faktor penting. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan antara lain:

1. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah,
  2. Pencapaian SDGs;
  3. Pengentasan kemiskinan,
  4. Pencapaian NSPK dan SPM,
  5. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
  6. Pengembangan daerah terisolir.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan Dengan memperhatikan arah pembangunan daerah Kabupaten Bone pada Tahun 2022, maka Kecamatan Ajangale merumuskan Rencana Kerja Tahun 2022 yang terdiri dari 5 Program, 12 Kegiatan, dan 27 Sub Kegiatan. Adapun Program, Kegiatan, dan Sub Keegiatannya yang tersebut sebagai berikut :

## **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota**

### **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

### **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

### **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
2. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya

### **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

### **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pengadaan Mebel
3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

### **Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

### **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## **2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

### **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**

1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

### **3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

#### **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

#### **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

### **4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

#### **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

### **5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

#### **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
2. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah. Penyusunan Renja berpedoman pada Renstra Kecamatan Ajangale dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bone.

Penyusunan Renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Kecamatan Ajangale merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Ajangale. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam Rencana Kerja Tahun 2022.

Rumusan Rencana Kerja dan pendanaan Perangkat daerah Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Bone  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22.00 Kecamatan Ajangale  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22.00 Kecamatan Ajangale

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
										Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
															Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tolok Ukur		Target
7																							
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																							
7	01																				<b>11,292,507,646</b>		
7	01	01																			<b>10,535,805,978</b>		
7	01	01																			<b>9,943,340,478</b>		
7	01	01	2.01																		<b>17,162,000</b>		
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>																					<b>44,813,670</b>		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	Persentase Penyusunan Dokumen Realisasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	100 Persen	6 Dokumen	100 %	9,504,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen				27,378,670		
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang Tersusun	Persentase Penyusunan Dokumen Realisasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	100 Persen	6 Dokumen	100 %	1,143,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen				4,400,000		
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Tersusun	Persentase Penyusunan Dokumen Realisasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	100 Persen	6 Dokumen	100 %	1,266,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen				4,400,000		
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja yang Tersusun dan dilaporkan sesuai kewajiban Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Realisasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	100 Persen	6 Dokumen	100 %	4,093,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen				4,235,000		
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Persentase Penyusunan Dokumen Realisasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	100 Persen	6 Dokumen	100 %	1,156,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen				4,400,000		
7	01	01	2.02																		<b>9,407,767,987</b>		
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																					<b>9,894,668,300</b>		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Bulan	100 %	9,407,767,987	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen				9,894,668,300		
7	01	01	2.05																		<b>6,250,000</b>		
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>																					<b>15,000,000</b>		
7	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Penyusunan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	100 Persen	30 Pasang	100 %	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen				9,000,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Bone  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22.00 Kecamatan Ajangale

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22.00 Kecamatan Ajangale

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Penyusunan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	100 Persen	20 Pasang	100 %	3,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	6,000,000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							<b>127,374,491</b>				<b>260,924,824</b>		
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	100 Persen	60 Paket	100 %	22,536,691	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	36,905,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Penyediaan Logistik Kantor	Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Paket	100 %	24,717,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	53,299,290
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Paket	100 %	5,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	12,729,200
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Pembayaran Media yang menyediakan Bahan Bacaan	Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Kali	100 %	1,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	4,356,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Rutin Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tupoksi Organisasi yang di ikuti	Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	100 Persen	240 Kegiatan	100 %	73,320,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	153,635,334
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							<b>56,714,000</b>				<b>100,316,700</b>		
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Unit	100 %	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	52,800,000
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Mebel	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	100 Persen	3 Paket	100 %	8,369,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	31,460,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Bone  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22.00 Kecamatan Ajangale

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22.00 Kecamatan Ajangale

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
													Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
																		Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tolok Ukur		Target
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	100 Persen	4 Paket	100 %	23,345,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	16,056,700								
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>279,800,000</b>				<b>108,490,542</b>										
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Rekening Listrik, Wifi dan Air yang Terbayarkan	Persentase Penyusunan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	100 Persen	36 Rekening	100 %	14,040,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	38,073,188								
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Tenaga Administrasi yang Mendapatkan Jasa Pelayanan Umum Kantor Selama Setahun	Persentase Penyusunan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	100 Persen	108 Kali	100 %	265,759,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	70,417,354								
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>48,272,000</b>				<b>125,916,260</b>										
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	100 Persen	48 Kali	100 %	43,952,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	102,984,794								
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Paket	100 %	4,320,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	22,931,466								
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>							<b>23,063,000</b>				<b>33,600,490</b>										
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>							<b>23,063,000</b>				<b>33,600,490</b>										
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Kegiatan	100 %	23,063,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Persen	33,600,490								
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>							<b>540,402,500</b>				<b>663,994,760</b>										
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2.01</b>		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>							<b>15,000,000</b>				<b>63,834,760</b>										
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS dan TKSK	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen	63,834,760								
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2.02</b>		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>							<b>525,402,500</b>				<b>600,160,000</b>										

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Bone  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22.00 Kecamatan Ajangale  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22.00 Kecamatan Ajangale

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Terlaksana	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Kegiatan	100 %	525,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen	592,900,000
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Terlaksana	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Kelurahan	100 %	402,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen	7,260,000
<b>7 01 04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>								<b>27,000,000</b>					<b>32,670,000</b>
<b>7 01 04 2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>								<b>27,000,000</b>					<b>32,670,000</b>
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Bulan	100 %	27,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 Persen	32,670,000
<b>7 01 06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>								<b>2,000,000</b>					<b>12,112,100</b>
<b>7 01 06 2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>								<b>2,000,000</b>					<b>12,112,100</b>
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes	Persentase Penyusunan Dokumen Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	4,791,600
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa	Persentase Penyusunan Dokumen Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	7,320,500
<b>TOTAL</b>									<b>10,535,805,978</b>					<b>11,292,507,646</b>



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ajangale Tahun 2022 disusun berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Bone yang tertuang dalam Rencana Strategis Perencanaan Daerah Kecamatan Ajangale Tahun 2018 – 2023 yang dalam penyusunan program dan kegiatan diselaraskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan perencanaan program dan kegiatan satu tahun kedepan dibuat secara efektif dan partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi masyarakat dan stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Ajangale untuk menjamin keberhasilan program / kegiatan Renja PD (program tahunan) yang merupakan implementasi dari Renstra Perangkat Daerah (program 5 tahunan), maka perlu dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan.
2. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja seluruh aparatur.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Ajangale selain menjadi program/kegiatan selama tahun 2022 juga berfungsi sebagai peningkatan kinerja aparatur serta barometer untuk menjadi umpan balik untuk perencanaan pada tahun berikutnya.

Rencana program di Kecamatan Ajangale tahun 2022 merupakan program pemberdayaan masyarakat serta kegiatan kerja aparatur Kecamatan Ajangale pada periode Tahun 2022. Dalam pengembangannya akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Ajangale yang pelaksanaannya bersifat efisien, tepat sasaran dan berdaya guna serta berhasil guna sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Bone yang ditetapkan.